TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2020 | Hal.: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sanggau Terbuka bagi Investor

SANGGAU, TRIBUN - Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sanggau, Alipius menyampaikan, Pihaknya membuka ruang sebesar-besar untuk investor yang ingin menanamkan modal investasinya di Kabupaten Sanggau. Akan tetapi harus memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat.

"Walaupun dari sisi aturan sudah mengharuskan setiap investor bisa mengajukan kapan saja asal mengurus persyaratan perizinan yang sudah dipersiapkan. Pemerintah Pusat memang sedang menggalakkan supaya Pemerintah Daerah membuka seluas-luasnya potensi investasi seluas-luasnya," katanya, Kamis (20/2).

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalbar, dikutip dari antaranews.com, mencatat realisasi penanaman modal pada triwulan I (Januari-Maret) 2019 tercatat nilai investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sanggau Rp 986,78 M.

Dikatakanya, untuk menarik investor ke Kabupaten Sanggau itu sangat mudah karena pihaknya membuka seluas-luasnya perizinan yang diberikan secara cepat dengan berbagai kemudahan-kemudahan.

TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2020 | Hal.: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Susun Rencana Umum Penanaman Modal

Kita tidak ingin investasi yang masuk merusak lingkungan

Alipius
Kadis DPM PTSP Sanggau

Saat ini, lanjutnya, kami sedang menyusun rencana umum penanaman modal (RUPM) yang didalamnya memuat potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Sanggau untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat dan investor.

Alipius menambahkan, lambannya pertumbuhan investasi di daerah dikarenakan daerah tidak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan izin investasi.

Semua izin investasi terlebih yang skala besar sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Misalnya investasi pertambangan, mineral, energi dan sebagainya, termasuk juga investasi di bidang perkebunan. Di daerah ini kewenangan kita hanya berkaitan dengan lingkungan saja dan pemberiaan tata ruang, dan kita tidak ingin investasi yang masuk merusak lingkungan," tuturnya.

Berkaitan dengan tata ruang, agar investasi yang masuk tidak mengganggu kearifan lokal. Pihaknya akan melakukan beberapa langkah di antaranya melihat kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang.

"Apakah lokasi yang akan digarapnya untuk dijadikan HGU bersentuhan atau tidak dengan kawasan-kawasan yang diakui secara adat atau kearifan lokal seperti Tembawang atau hutan adat. Jika bersentuhan kami minta dilakukan inclub atau tidak boleh dikelola, itu komitmen kami Pemerintah Daerah," tuturnya.

Tokoh Pemuda Sanggau, Zaenuri menyambut baik dengan langkah dari Pemkab Sanggau yang membuka ruang sebesar-besar untuk investor yang ingin menanamkan modal investasinya di Kabupaten Sanggau.

"Saya sangat menyambut baik, namun yang sangat penting. Jangan sampai ada peraturan daerah atau regulasi yang justeru menghambat investasi," katanya.

Dikatakannya, jika ada regulasi atau peraturan daerah yang justru menghambat diharapkan agar direvisi saja. Selain itu, Zaenuri juga berharap agar birokrasi juga harus lebih sederhana, cepat dan biaya murah. **(hen)**